

INTEGRASI SISTEM KEUANGAN DI ASIA TIMUR DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA TERHADAP REGULASI PERBANKAN

ZULFI DIANE ZAINI

FH Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

Abstrak

Salah satu pilar utama sebagai upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan suatu negara diperlukan Pengaturan tentang Pengaman Sistem Keuangan (*financial safety net*) yang secara umum dapat mencegah *bank run*, meminimalkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan, dan mengurangi frekuensi serta dampak kontraksi ekonomi. Sebagai upaya mengoptimalkan pengaman sistem keuangan di kawasan Negara-negara yang tergabung dalam *Association of the South East Asian Nations (ASEAN)* ditindaklanjuti dengan perluasan kerjasama ekonomi di bidang keuangan dan moneter dalam kawasan Asia Timur dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara stabilitas keuangan regional, menjaga dan mendorong pertumbuhan regional dan domestik yang berkesinambungan serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan internasional. Secara spesifik kawasan Asia Timur mencakup negara-negara yang tergabung dalam kerjasama *ASEAN + 3* Negara. Dimana *ASEAN* yang terdiri atas 10 Negara yaitu : Indonesia, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam serta plus 3 yaitu China, Jepang dan Korea Selatan. Dalam perkembangannya berbagai inisiatif kerja sama keuangan di kawasan Asia Timur telah mengemuka, bervariasi dalam bentuk usulan memperkuat *regional surveillance*, inisiatif untuk membentuk fasilitas keuangan regional, pengembangan pasar keuangan regional dan usulan kerja sama nilai tukar regional. Inisiatif kerja sama kawasan terus bergulir dan berevolusi mencari bentuk-bentuk yang ideal untuk dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan bersama, yaitu : **menciptakan stabilitas keuangan regional**. Hal tersebut kemudian mendorong negara-negara anggota untuk mulai memikirkan pencapaian kerja sama dalam bentuk integrasi keuangan dan moneter Asia Timur.

Kata Kunci: Integrasi, system keuangan, Regulasi perbankan

I. PENDAHULUAN

Sistem Keuangan di Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, telah mengalami perubahan yang cukup berarti selama kurun waktu tahun 1980 an sampai dengan

sekarang. Hampir semua Negara Asia melakukan liberalisasi system keuangannya yang pada umumnya disertai dengan kelonggaran arus modal asing dan pengawasan devisa. Perubahan tersebut mendorong perubahan arah dan kebijakan

moneter, mempengaruhi hubungan antara permintaan uang, pendapatan dan suku bunga, serta mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang instrumen-instrumen moneter yang tepat sebagai upaya untuk menentukan kebijaksanaan yang dikeluarkan. Meskipun liberalisasi tersebut diikuti oleh paket-paket kebijakan lainnya yang disempurnakan, namun belum dapat mengurangi kelemahan di berbagai sektor perekonomian yang ada.

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*). Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.

Pentingnya peranan sistem keuangan suatu negara tentu akan dapat memacu terwujudnya suatu sistem keuangan yang sehat dan stabil. Oleh karenanya kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia memerlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan yang dititikberatkan pada upaya untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang oleh 3 (tiga) pilar utama yaitu : Kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian; Sistem pembayaran yang cepat, tepat dan aman; serta Sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien. (Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 4)

Terwujudnya stabilitas sistem keuangan merupakan suatu rangkaian proses dan kegiatan yang diawali dengan

pemantauan (*surveillance*) dan identifikasi kemungkinan timbulnya suatu krisis, sampai dengan pencegahan krisis tersebut terjadi. Aspek pemantauan dan identifikasi krisis merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, karena langkah preventif dan antisipatif dipandang sebagai langkah yang lebih murah daripada penyelesaian krisis (*crisis resolution*).

Ketidakstabilan sektor keuangan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas mobilisasi dana yang sangat diperlukan oleh sektor riil. Dengan terhambatnya aliran dana tersebut, sektor riil akan membatasi bahkan menghentikan aktivitas perekonomian. Di samping itu, kestabilan sektor keuangan, khususnya pasar keuangan, sangat diperlukan dalam menunjang proses transmisi kebijakan moneter. Beranjak dari pentingnya stabilitas keuangan bagi eksistensi lembaga keuangan secara individu maupun pertumbuhan sektor keuangan, moneter dan fiskal secara keseluruhan, maka diperlukan suatu kebijakan publik (*public policy*) yang konsisten, terintegrasi dan tidak saling menimbulkan distorsi.

Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan tersebut dibutuhkan adanya kolaborasi yang erat antara pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap stabilitas sektor keuangan, moneter dan fiskal. Dalam arti, adanya koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara badan-badan atau lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sektor keuangan, moneter dan fiskal baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Integrasi ekonomi dan keuangan regional dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi kecenderungan di berbagai

belahan dunia. Kedekatan geografis dan historis serta hubungan ekonomi antar negara di suatu kawasan seringkali menjadi pendorong utama pembentukan integrasi ekonomi dan keuangan regional, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dalam kawasan regional secara khusus.

Dalam proses integrasi regional, pendekatan yang berbeda ditempuh oleh berbagai kawasan. Di Eropa misalnya, integrasi regional diawali dengan integrasi ekonomi (sektor riil) yang kemudian diikuti dengan integrasi moneter dan diakhiri dengan pembentukan mata uang tunggal *Euro*. Sebaliknya di kawasan Afrika (*CFA Franc Zone*) dan *Gulf Area*, pembentukan dan penggunaan mata uang bersama mengawali upaya proses integrasi ekonomi di kawasan tersebut. (Sjamsul Arifin, R. Winantyo dan Yati Kurniati, *Integrasi Keuangan dan Moneter Di Asia Timur, Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*, Biro Hubungan Dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, PT. Elex Media Komputindo-Gramedia Group, Jakarta, 2007, hlm.1)

Sementara di kawasan ASEAN telah ada integrasi ekonomi dan keuangan sebagai suatu arsitektur yang terdiri dari 2 (dua) pilar utama.

Untuk memahami proses integrasi regional, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan antara konsep integrasi ekonomi dan integrasi keuangan. Integrasi Ekonomi adalah integrasi di sektor riil yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya yang dilakukan adalah melalui konsep liberalisasi sehingga terjadi kebebasan arus faktor-faktor produksi, yaitu : modal, tenaga kerja, jasa-jasa dan investasi, termasuk kerjasama dalam mengurangi dan pada

akhirnya menghapus hambatan perdagangan intra kawasan. Integrasi ekonomi mengandung aspek-aspek kompetisi yang memerlukan persiapan serius agar suatu negara dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari proses integrasi tersebut. (Sjamsul Arifin, R. Winantyo dan Yati Kurniati, *Integrasi Keuangan dan Moneter Di Asia Timur, Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*, Biro Hubungan Dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, PT. Elex Media Komputindo-Gramedia Group, Jakarta, 2007, hlm.1)

Berbeda dengan Integrasi Ekonomi, Integrasi Keuangan dan Moneter terfokus pada bentuk kerjasama untuk memelihara stabilitas keuangan dan nilai tukar, termasuk pencegahan krisis keuangan. Integrasi Keuangan pada intinya menghapus hambatan lalu lintas arus keuangan antar negara di kawasan serta mengembangkan infrastruktur keuangan regional untuk mendukung kelancaran dan meningkatkan transaksi keuangan lintas batas, serta memelihara stabilitas keuangan dalam suatu kawasan. Integrasi keuangan dalam jangka panjang pada akhirnya dapat mewujudkan penyatuan atau Integrasi Moneter Regional. (Sjamsul Arifin, R. Winantyo dan Yati Kurniati, *Integrasi Keuangan dan Moneter Di Asia Timur, Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*, Biro Hubungan Dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, PT. Elex Media Komputindo-Gramedia Group, Jakarta, 2007, hlm.1).

Selanjutnya integrasi keuangan yang dikembangkan dalam kawasan *Association of the South East Asian Nations (ASEAN)* ditindaklanjuti dengan perluasan kerjasama ekonomi di bidang keuangan dan moneter dalam kawasan Asia Timur dengan tujuan

untuk mencapai dan memelihara stabilitas keuangan regional, menjaga dan mendorong pertumbuhan regional dan domestik yang berkesinambungan serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan internasional.

Secara spesifik kawasan Asia Timur mencakup negara-negara yang tergabung dalam kerjasama *ASEAN + 3* Negara. Dimana *ASEAN* yang terdiri atas 10 Negara yaitu : Indonesia, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam serta plus 3 yaitu China, Jepang dan Korea Selatan.

Dalam perkembangannya berbagai inisiatif kerja sama keuangan di kawasan Asia Timur telah mengemuka, bervariasi dalam bentuk usulan memperkuat *regional surveillance*, inisiatif untuk membentuk fasilitas keuangan regional, pengembangan pasar keuangan regional dan usulan kerja sama nilai tukar regional. Inisiatif kerja sama kawasan terus bergulir dan berevolusi mencari bentuk-bentuk yang ideal untuk dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan bersama, yaitu : menciptakan stabilitas keuangan regional. Hal ini kemudian mendorong negara-negara anggota untuk mulai memikirkan pencapaian kerja sama dalam bentuk integrasi keuangan dan moneter Asia Timur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yakni Bagaimanakah bentuk Integrasi Sistem Keuangan dalam kawasan Asia Timur?, Bagaimanakah Implikasi dari Integrasi Sistem Keuangan di Asia Timur bagi Indonesia khususnya dalam regulasi sektor perbankan?

II. PEMBAHASAN

Peningkatan intensitas kerjasama moneter dan keuangan di Kawasan Asia Timur (*ASEAN + Jepang, Korea Selatan dan China*) sejak pertengahan Tahun 1990 an, secara umum dilatar belakangi oleh 3 (tiga faktor utama), yaitu : (Sjamsul Arifin, R. Winantyo dan Yati Kurniati, *Integrasi Keuangan dan Moneter Di Asia Timur, Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*, Biro Hubungan Dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, PT. Elex Media Komputindo-Gramedia Group, Jakarta, 2007, hlm.4-6) .

1. Krisis Keuangan dan Moneter di Asia Timur yang terjadi di Tahun 1997. Krisis tersebut telah menyadarkan negara-negara di kawasan Asia Timur mengenai kerentanan kawasan tersebut terhadap efek tular (*contagion effect*) dari krisis ekonomi yang terjadi pada suatu negara di kawasan. Dengan adanya krisis tersebut, semakin diyakini bahwa stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara dapat terganggu akibat dari ketidak stabilan di negara lain dalam satu kawasan. Peristiwa tersebut telah menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya penguatan kerjasama dalam bidang keuangan dan moneter di kawasan sekaligus mengambil inisiatif untuk melakukan pelebagaan atas kerjasama keuangan dan moneter tersebut. Penguatan kerjasama keuangan juga diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi krisis di kemudian hari.
2. Kelemahan Arsitektur Keuangan Internasional (*International Financial Architecture-IFA*) dalam menghadapi perkembangan integrasi ekonomi global. *IFA* dianggap kurang memadai

dalam mengakomodasi kepentingan dari negara-negara sedang berkembang. Secara umum dapat dianalisa, bahwa manfaat *IFA* bagi negara-negara berkembang sangat terbatas, khususnya dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan di tengah tantangan globalisasi keuangan dunia yang ditandai dengan perkembangan aliran modal swasta dalam jumlah besar dan dengan volatilitas yang tinggi. Beberapa fungsi *IFA* yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya antara lain tercermin dari kegagalan dalam mencegah dan menanggulangi krisis Asia sehingga menumbuhkan semangat negara-negara di kawasan Asia Timur untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang keuangan.

3. Peningkatan interdependensi ekonomi regional yang terjadi pada negara-negara di kawasan Asia Timur, yang kemudian membentuk prakarsa kebijakan yang dilandasai oleh kepentingan yang sama dalam bidang keuangan dan moneter. Keinginan tersebut kemudian juga diperkuat oleh adanya fakta empiris yaitu adanya peningkatan intensitas proses integrasi regional melalui jalur perdagangan di Asia Timur dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

Selain ke tiga faktor tersebut di atas, kerjasama keuangan dan moneter di Asia Timur juga dilatarbelakangi oleh keberhasilan penyatuan ekonomi dan peluncuran mata uang tunggal di kawasan Eropa (*Euro*). Peluncuran *Euro* di 12 negara anggota *European Union* (*EU*) telah menarik perhatian negara-negara berkembang dan emerging markets yang

telah melakukan liberalisasi perdagangan dan pergerakan faktor produksi.

1. Bentuk Integrasi Sistem Keuangan di Kawasan Asia Timur.

Kerjasama di kawasan Asia Timur yang pada awalnya terfokus di bidang perdagangan dan investasi, setelah krisis Asia Tahun 1997 lebih diarahkan pada sektor keuangan dan moneter. Peningkatan intensitas kerjasama di kawasan Asia Timur tersebut terutama dimaksudkan untuk mengatasi dan mencegah berulangnya krisis, dilakukan baik melalui forum yang telah ada seperti : *Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks* (*EMEAP*) (*EMEAP* merupakan forum bank-bank sentral Asia Pasifik yang keanggotaannya terdiri dari *Reserve Bank of Australia* (*RBA*), *People's Bank of China* (*PBC*), *Bank Indonesia* (*BI*), *Hongkong Monetary Authority* (*HKMA*), *Bank of Japan* (*BOJ*), *Bank of Korea* (*BOK*), *Bank Negara Malaysia* (*BNM*), *Reserve Bank of New Zealand* (*RBNZ*), *Bangko Sentral ng Pilipinas* (*BSP*), *Monetary Authority of Singapore* (*MAS*) dan *Bank of Thailand* (*BOT*)). perluasan kerjasama *ASEAN* menjadi *ASEAN + 3 Negara*, maupun melalui pembentukan forum baru seperti *Manila Framework Group* (*MFG*), dan lain-lain.

Embrio dari kerjasama sektor keuangan di Asia Timur adalah pertemuan tahunan tingkat Menteri Keuangan *ASEAN* (*ASEAN Finance Minister's Meeting-AFMM*) yang pertama kali dilaksanakan pada Tahun 1997. Secara struktural, *AFMM* merupakan Badan pengambil keputusan

tertinggi di bidang kerjasama keuangan ASEAN. Sejalan dengan upaya pencegahan krisis, negara-negara ASEAN sepakat membentuk kerjasama di bidang "Surveillance". Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman mengenai pembentukan ASEAN Surveillance Process (*Terms of Understanding on the Establishment of the ASEAN Surveillance Process*) oleh para Menteri Keuangan ASEAN di Washington DC, Amerika Serikat pada Tanggal 4 Oktober 1998.

Perkembangan kerjasama keuangan di kawasan Asia Timur mengalami perkembangan penting dengan dicapainya kesepakatan antara 10 (sepuluh) Negara Anggota ASEAN dengan Jepang, China dan Korea Selatan yang selanjutnya dikenal sebagai Kelompok Negara ASEAN + 3, dengan dideklarasikannya "Pernyataan Bersama Kerjasama Asia Timur" pada Tahun 1999. Deklarasi tersebut berisi kesepakatan untuk meningkatkan dialog dan kerjasama di berbagai bidang, yang diawali dengan kerjasama Proses Surveillance ASEAN+3 yaitu : Proses Review Ekonomi dan Dialog Kebijakan (*Economic Review and Policy Dialogue-ERPD*). Proses surveillance antara lain bermanfaat untuk mendeteksi secara dini kerentanan kondisi ekonomi dan keuangan suatu negara terhadap kemungkinan gejolak eksternal.

Untuk mendukung kegiatan surveillance di tingkat ASEAN maupun di Asia Timur, Asian Development Bank (ADB) mengembangkan penggunaan model sistem peringatan dini untuk mendeteksi dari awal

potensi kerentanan atau krisis di sektor keuangan, yaitu krisis nilai tukar dan krisis perbankan, selanjutnya hasil asesmen sinyal deteksi dini tersebut hanya merupakan peringatan awal yang masih memerlukan analisis dan penilaian lebih lanjut untuk pengambil keputusan.

Kegiatan ASEAN dan ASEAN +3 mengenai surveillance process mendapat dukungan penuh dari ADB. Dukungan ADB ditujukan untuk membantu negara-negara anggota ASEAN + 3 dalam melakukan proses pemantauan ekonomi dan keuangan. Bahkan terkait dengan pembentukan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang telah disetujui oleh para kepala pemerintahan negara anggota ASEAN + 3 pada Summit meeting Tahun 2000, ADB membantu dalam hal pengembangan perangkat lunak (*software*) untuk diaplikasikan di masing-masing negara anggota termasuk Indonesia. Secara bertahap, ADB juga telah memberikan bantuan teknis dalam bentuk *capacity building* berupa pelatihan kepada pejabat dan staf dari negara-negara ASEAN yang menangani fungsi surveillance ekonomi dan keuangan di negaranya. Di samping itu, ADB juga turut melakukan pemantauan terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan negara-negara di kawasan ASEAN + 3.

Bentuk kerjasama keuangan Asia Timur yang mengarah kepada proses integrasi keuangan dan moneter pada dasarnya terdiri dari 4 (empat) pilar utama, yaitu :

a. Surveillance;

- b. Kerjasama Bantuan Likuiditas Regional (*Regional Liquidity Arrangement*);
- c. Pengembangan Pasar Modal (*Capital Market Development*) dan
- d. Kerjasama Nilai Tukar (*Exchange Rate Cooperation*).
 - a. Di bidang *Regional Surveillance* (**pilar pertama**), proses *surveillance* dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk pertukaran informasi dan diskusi serta koordinasi kebijakan untuk mencari pemecahan bersama mengenai permasalahan dan tantangan ekonomi yang dihadapi kawasan. Berbagai bentuk *surveillance* di kawasan, upaya penyempurnaan mekanisme *surveillance* serta peningkatan kemampuan *surveillance* untuk mendeteksi secara dini potensi krisis dilakukan melalui pengembangan system deteksi dini (*Early Warning System – EWS*);
 - b. Dalam hal penyediaan *Bantuan Likuiditas Regional* (**pilar kedua**), mempunyai tujuan untuk mencegah kesulitan Neraca Pembayaran jangka pendek di kawasan. Penyempurnaan terhadap bentuk kerjasama penyediaan bantuan likuiditas regional tersebut telah dan terus dilakukan termasuk dalam hal peningkatan jumlah, kejelasan prosedur aktivasi dan proses pengambilan keputusan bersama
 - c. Pengembangan *Pasar Keuangan Regional* (**pilar ketiga**), khususnya Pasar Modal, telah dijalankan melalui berbagai inisiatif untuk menciptakan penawaran dan permintaan terhadap sekuritas Asia, misalnya penerbitan indeks saham *ASEAN*, obligasi berdenominasi mata uang lokal oleh Lembaga Multilateral di beberapa Negara *ASEAN + 3*, *Asian Bond Fund 1 dan 2* (*ABF 1 dan ABF 2*) serta peningkatan infrastruktur keuangan. Akan tetapi, upaya pengembangan Pasar Modal Asia berjalan timpang karena adanya perbedaan tingkat perkembangan Pasar Keuangan masing-masing Negara Anggota yang mempersulit proses harmonisasi standard dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengintegrasikan Pasar Modal antar Negara anggota;
 - d. Kerjasama *Nilai Tukar Regional* (*Regional Exchange Rate Cooperation*), (**pilar keempat**), merupakan pilar terakhir untuk mendukung integrasi keuangan yaitu mewujudkan stabilisasi nilai tukar di kawasan. Stabilisasi nilai tukar kawasan menjadi tujuan jangka panjang sejalan dengan tujuan peningkatan integrasi ekonomi regional secara substantial. Dalam kaitan ini, mata uang tunggal *ASEAN* pernah dipertimbangkan untuk menjadi tujuan

jangka panjang dalam kerjasama moneter dan keuangan ASEAN. Namun rendahnya tingkat konvergensi ekonomi dan keuangan antar negara ASEAN dan ASEAN + 3 dan belum terpenuhinya berbagai prakondisi yang dibutuhkan membuat upaya ke arah pembentukan mata uang tunggal menjadi kurang *feasible* dalam jangka waktu pendek dan menengah. Dalam kaitan tersebut, negara-negara Asia Timur juga masih menghadapi masalah dengan komitmen politik mengingat pembentukan rezim nilai tukar bersama memerlukan pengorbanan *sovereignty* atas kebijakan domestik, di samping itu tanpa mekanisme koordinasi yang formal, stabilitas nilai tukar intra kawasan akan sangat rentan.

Terdapat 3 (tiga) manfaat utama yang dapat tercipta dari proses integrasi keuangan, yaitu :

a. Sharing Risiko.

Integrasi keuangan akan memperluas alternatif investasi sekaligus alternatif bagi diversifikasi risiko antar berbagai aset keuangan serta memperlancar kebutuhan konsumsi secara intertemporal, hal ini merupakan elemen terpenting dari integrasi keuangan. *Sharing Risiko* antar kawasan juga mampu meningkatkan spesialisasi produksi. Peningkatan instrumen keuangan dan kepemilikan aset antar negara

yang tercipta dari adanya integrasi keuangan dapat memperluas kemungkinan untuk melakukan diversifikasi portofolio bagi risiko yang bersifat *unsystemic*.

b. Meningkatkan Alokasi Modal.

Secara umum telah dipahami bahwa integrasi keuangan memungkinkan terjadinya alokasi modal yang lebih baik. Hilangnya hambatan-hambatan perdagangan aset keuangan, kliring, dan settlement pada akhirnya akan meningkatkan alokasi modal yang dapat diinvestasikan oleh penanam modal. Disamping itu, integrasi keuangan akan meningkatkan keyakinan investor karena mereka mempunyai kesempatan untuk menanamkan modalnya di berbagai negara yang dianggap menguntungkan.

c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Integrasi keuangan juga dapat mendorong pembangunan sektor keuangan yang lebih pesat yang pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu jalur utama bagi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui peningkatan perkembangan sektor keuangan. Integrasi keuangan memungkinkan terjadinya lalu lintas modal yang lebih pesat untuk kegiatan investasi. Hal tersebut berarti integrasi keuangan telah memfasilitasi peningkatan peluang investasi di berbagai negara sekaligus memberikan alternatif bagi jenis investasi yang lebih

menarik di luar negeri dalam satu kawasan. Dengan demikian, adanya aliran modal yang masuk tersebut secara tidak langsung telah menggerakkan perkembangan sektor keuangan untuk tumbuh lebih maju dan berkembang.

Mengacu pada kesepakatan-kesepakatan regional di bidang keuangan yang sudah menjadi komitmen bersama pencapaiannya, serta mengikuti kemajuan perkembangan inisiatif-inisiatif terkait untuk menunjang integrasi keuangan dan moneter regional, masing-masing negara anggota seharusnya memiliki strategi nasional yang cukup mapan untuk dapat memanfaatkan momentum kerjasama regional untuk kepentingan kemajuan ekonomi dan keuangan domestik di masing-masing negara anggota *ASEAN + 3*.

2. Implikasi Integrasi Sistem Keuangan di Asia Timur bagi Indonesia terhadap Regulasi Sektor Perbankan.

Salah satu pilar utama sebagai upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan di Indonesia diperlukan Pengaturan tentang Pengaman Sistem Keuangan (*financial safety net*) yang secara umum dapat mencegah *bank run*, meminimalkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan, dan mengurangi frekuensi serta dampak kontraksi ekonomi di Indonesia.

Krisis keuangan dan perbankan yang terjadi di Indonesia kurun waktu Tahun 1997-1998 yang lalu, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya penciptaan suatu kerangka hukum yang pasti

terhadap stabilitas sistem keuangan yang diwujudkan dalam bentuk Sistem Pengaman Keuangan. Terwujudnya stabilitas sistem keuangan merupakan suatu rangkaian proses dan kegiatan yang diawali dengan pemantauan (*surveillance*) dan identifikasi kemungkinan timbulnya suatu krisis, sampai dengan pencegahan krisis tersebut terjadi. Aspek pemantauan dan identifikasi krisis merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, karena langkah preventif dan antisipatif dipandang sebagai langkah yang lebih murah daripada penyelesaian krisis (*crisis resolution*).

Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi (Paket Oktober 1988) yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa Undang-Undang di bidang keuangan dan perbankan sejak Tahun 1992, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (BI);

- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Konsekuensi dikeluarkannya Undang-Undang tersebut di atas, adalah terjadinya perubahan struktur sistem lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, dan jika dilihat dari aspek pengaturan serta pembinaan, lembaga-lembaga keuangan menjadi semakin jelas dan kuat karena telah memiliki kekuatan hukum yang efektif.

Salah satu masalah yang cukup penting dalam sistem keuangan yang dapat menjadi sumber instabilitas keuangan yakni terjadinya asimetri /ketidaksamaan informasi (*asymmetric information*) yakni suatu situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain (Frederic S. Mishkin, *Prudential Supervision What Works and What Doesn't*, NBER Conference Report Chicago, The University of Chicago Press, 2001, hlm. 70).

Selanjutnya sebagai contoh, peminjam (debitur) biasanya memiliki informasi yang lebih baik terhadap keuntungan dan kerugian potensial dari suatu proyek investasi yang direncanakan dibandingkan dengan pihak pemberi pinjaman (kreditur). Dengan demikian, kreditur tidak dapat membedakan antara pinjaman yang sehat dan tidak sehat.

Stabilitas keuangan di Indonesia merupakan faktor penting karena stabilitas keuangan merupakan suatu persyaratan prakondisi yang penting

bagi pertumbuhan perkeonomian. Jika lembaga-lembaga keuangan dan pasar keuangan yang berperan sebagai mediator keuangan berada dalam kondisi tidak stabil ataupun menghadapi ketidakpastian, maka dapat dipastikan aktivitas perekonomian akan sulit berjalan dengan optimal, karena rendahnya aktivitas produksi, konsumsi maupun investasi. Di samping itu, dalam kondisi tingkat inflasi yang tinggi, akan sulit pula bagi perekonomian suatu Negara untuk tetap kompetitif dalam menghadapi persaingan global. Dengan demikian dapat dianalisis bahwa untuk mencapai kondisi sektor keuangan yang stabil, antara lain diperlukan Lembaga Keuangan yang sehat, Pasar keuangan yang stabil, lembaga pengaturan dan pengawasan yang kompeten serta regulasi dan Peraturan Perundang-undangan yang efektif sebagai Perundang-undangan yang memayungi sistem keuangan di Indonesia yakni dalam bentuk Pengaturan Sistem Pengaman Keuangan.

Sistem Pengaman Keuangan (*financial safety net system*) merupakan salah satu pilar utama dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, dimana dengan adanya pengaturan secara khusus dan tegas, maka dapat diupayakan dan dicegah terjadinya *bank run*, meminimalkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan, dan mengurangi frekuensi serta dampak kontraksi ekonomi di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengaturan dan pengelolaan Sistem Pengaman Keuangan secara khusus mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu : (Sukarela

pula perangkat hukum yang melandasi kerangka kerja (*framework*) manajemen krisis yang bersifat strategis (*crisis strategy management*);

- b. Regulasi yang dibuat dikaitkan dengan Kebijakan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*, yakni dalam pemberian kebijakan bantuan likuiditas terhadap penyelamatan perbankan nasional sebagai upaya penyelamatan perekonomian nasional. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan likuiditas tersebut Bank Indonesia selaku pengawas, tetap menjalankan pengawasan yang ketat terhadap penyaluran bantuan likuiditas tersebut terhadap bank-bank yang betul-betul digunakan untuk membayar penarikan simpanan nasabah.

Dari kedua hal tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa kedua kebijakan dan regulasi yang akan diterapkan oleh Bank Indonesia tersebut sejalan dengan konsep kerjasama dalam bidang moneter dan keuangan yang dilakukan oleh Negara-negara anggota *ASEAN + 3* dalam bentuk integrasi keuangan di Asia Timur.

Dalam konteks kegiatan *surveillance* yang dikoordinasikan *ADB* sebagai tindak lanjut dari kerjasama sistem keuangan kawasan Asia Timur sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penyusunan *Country Surveillance Report* oleh *National Surveillance Unit (NSU)* Indonesia melibatkan Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Pasar Modal, Badan Pusat Statistik dan instansi pemerintah

terkait lainnya. Masing-masing institusi tersebut menyediakan data, pembaruan data secara rutin, dan melakukan analisis sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya. Asosiasi swasta juga dilibatkan sebagai nara sumber untuk kebutuhan verifikasi dan klarifikasi data. *Country Surveillance Report* tersebut kemudian juga disampaikan kepada Sekretariat *ASEAN* secara periodik dua kali dalam setahun untuk memenuhi keperluan sidang *ASEAN* pada tingkat Menteri Keuangan sebagai materi dialog kebijakan.

Model sistem peringatan dini yang diperkenalkan *ADB*, telah dikembangkan pula dalam bentuk perangkat lunak yang disebut *Vulnerability Indicator and Early Warning Systems (VIEWS)*. Perangkat lunak tersebut juga telah diimplementasikan di *NSU* Indonesia dan digunakan sebagai komplemen dalam melakukan analisis kebijakan, terutama yang berkaitan dengan regulasi perbankan Indonesia.

Khusus dalam sektor jasa keuangan, infrastruktur sektor keuangan di Indonesia masih perlu dibenahi dan dilengkapi untuk dapat bersaing dengan sektor-sektor jasa keuangan yang telah maju di beberapa negara Asia lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Momentum upaya perbaikan dan penguatan infrastruktur pasar keuangan regional, khususnya di pasar modal dan lembaga perbankan, perlu dimanfaatkan untuk penguatan infrastruktur pasar keuangan domestik. Hal tersebut diperlukan agar Indonesia tidak tertinggal dalam proses menuju konvergensi ekonomi

kawasan Asia Timur dalam mengarah kepada integrasi keuangan.

Selain berkaitan dengan pengembangan kelembagaan, instrumen pasar keuangan dan teknologi, pengembangan infrastruktur pasar keuangan yang terkait dengan ketentuan dan prosedur sangat krusial, karena untuk mewujudkan sistem keuangan yang terintegrasi diperlukan satu ketentuan yang dapat mengatur semua kegiatan dan kebijakan pasar keuangan serta lembaga perbankan secara terpadu. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai inisiatif untuk melakukan harmonisasi ketentuan khususnya dari aspek hukum dan kebijakan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Indonesia kemudian dituntut untuk dapat menerapkan *Internatioanl Best Practice* pada sistem keuangan sesuai dengan kondisi dan perkembangan sistem keuangan domestik.

Berkaitan dengan kebijakan dan regulasi sektor perbankan di Indonesia sebagai tindak lanjut dan salah satu aspek perwujudan kerjasama di tingkat *ASEAN* dan *ASEAN + 3*, maka sejak Bulan Januari 2004 Bank Indonesia telah memiliki sebuah *blueprint* mengenai tatanan industri perbankan ke depan, yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API merupakan sebuah istilah baru di perbankan nasional, tetapi sebelumnya telah dikenal pula beberapa istilah lain yang mempunyai arti dan tujuan relatif sama, yaitu *blueprint perbankan*, *landscape perbankan*, *stratifikasi perbankan* atau pemetaan perbankan nasional.

Istilah API lebih memberikan makna dan nuansa yang komprehensif dan luas mengenai tatanan perbankan yang diinginkan oleh Indonesia ke masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa API merupakan *policy direction* dan *policy recommendations* bagi industri perbankan nasional dalam jangka panjang. (Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Opcit*, hlm. 178).

API merupakan program pengembangan perbankan (termasuk di dalamnya pengembangan regulasi perbankan nasional) untuk mencapai suatu visi dan bentuk industri perbankan nasional, yakni menghasilkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien yang mampu menciptakan kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, setiap kebijakan dan regulasi perbankan yang dikeluarkan dalam kurun waktu 10 sampai dengan 15 tahun ke depan tidak terlepas dari *frame work* API.

API di Indonesia dapat berfungsi sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam industri perbankan ke depan (*as a tool of banking engeenering*), yang berarti Arsitektur Perbankan (*Banking Architecture*) akan menjadi *benchmark*, *platform*, maupun sasaran yang hendak dicapai oleh perbankan nasional. Dalam fungsinya yang demikian, diharapkan industri perbankan nasional bersama-sama dengan *stakeholders* lainnya akan mengetahui bagaimana bentuk dan wujud perbankan nasional dalam kurun waktu kurang lebih 10 sampai dengan 15 tahun ke

depan baik dari segi regulasi, pengawasan, struktur kelembagaan, dan sebagainya.

Membangun industri perbankan yang kuat dan sehat adalah suatu prasyarat mutlak dalam perekonomian nasional, karena melalui peran intermediasi perbankan, roda perekonomian dapat digerakkan lebih cepat, sistem keuangan dapat berjalan dengan maksimal, sehingga stabilitas ekonomi juga dapat terpelihara. Dengan demikian lembaga perbankan nasional harus dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan mengedepankan *prinsip prudensialitas* serta diperlukan pula arah yang jelas dalam upaya menciptakan industri perbankan yang sehat, kuat dan efisien.

Diharapkan apabila API telah diimplementasikan dengan baik akan ada bank nasional yang mampu menjadi *regional champion*, baik di tingkat *ASEAN* maupun kawasan Asia Timur. Selanjutnya, untuk mencapai visi dan tujuan API, Bank Indonesia memformulasikan 6 (enam) pilar utama sebagai sasaran yang akan dicapai, yaitu :

1. Struktur perbankan yang sehat dan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional dan berdaya saing internasional;
2. Sistem pengaturan yang efektif dan mampu mengantisipasi perkembangan pasar keuangan domestik dan internasional;
3. Sistem pengawasan bank yang independen dan efektif;
4. Penguatan kondisi internal industri perbankan;

5. Penciptaan dan penguatan infrastruktur pendukung industri perbankan; dan
6. Perlindungan dan pemberdayaan nasabah.

Dalam skala regional, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Negara-negara yang tergabung dalam *ASEAN + 3* (Asia Timur) ke depan (termasuk Indonesia) sebagai upaya untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan, yaitu :

- a. Mencapai komitmen politik yang kuat di antara seluruh negara anggota;
- b. Menghapus seluruh hambatan-hambatan dalam kegiatan perdagangan intra kawasan, baik perdagangan barang maupun jasa, sekaligus menetapkan *timeline* untuk mencapai pasar tunggal dalam kawasan Asia Timur;
- c. Menciptakan lembaga supranasional yang kredibel dan kuat;
- d. Memperkuat *regional surveillance*;
- e. Memperkuat kerjasama bantuan likuiditas regional;
- f. Mendorong harmonisasi Arsitektur Keuangan Regional dengan mengadopsi kerangka pengaturan dan pengawasan internasional secara konsisten;
- g. Memiliki *roadmap* integrasi ekonomi dan keuangan yang terintegrasi. (Sjamsul Arifin, R. Winantyo dan Yati Kurniati, *Integrasi Keuangan dan Moneter Di Asia Timur, Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*, Opcit, hlm. 237).

Selanjutnya dalam skala Nasional, di Indonesia upaya untuk memperkuat kesiapan Indonesia dalam mengikuti proses integrasi ekonomi dan keuangan dalam kawasan Asia Timur dapat dilakukan dengan : memperoleh komitmen politik dari Pemerintah; meningkatkan koordinasi antara instansi terkait baik Pemerintah maupun Swasta; mengoptimalkan pemanfaatan kerjasama regional dan internasional untuk penguatan perekonomian domestik; menyusun *roadmap* nasional untuk kepentingan industri dalam negeri baik dalam sektor riil maupun sektor keuangan sebagai upaya menyikapi proses integrasi ekonomi Asia; meningkatkan efektivitas *surveillance* nasional; serta memperkuat dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang perdagangan, investasi dan transaksi keuangan internasional.

Bagi Indonesia sendiri, harus segera melakukan pembenahan di berbagai sektor agar Indonesia dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari proses integrasi ekonomi dan keuangan regional. Kegagalan dalam mempersiapkan diri akan menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, yakni : Indonesia tetap melaksanakan komitmen dengan risiko kalah dalam persaingan sehingga kesejahteraan masyarakat semakin memburuk; serta Indonesia ingkar janji dengan meminta penundaan karena alasan belum siap dan dapat berdampak pada penurunan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Seharusnya, dengan atau tanpa komitmen terhadap negara lain, langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan

efisiensi memang perlu ditempuh oleh Pemerintah Indonesia.

Peningkatan kinerja ekonomi dengan sendirinya dapat membawa Indonesia menuju konvergensi ekonomi dengan negara-negara di kawasan (*regional*), sehingga dapat bersaing dan dalam posisi diuntungkan dalam integrasi ekonomi dan keuangan di wilayah Asia Timur.

III. PENUTUP

- a. Perkembangan kerjasama keuangan di kawasan Asia Timur mengalami perkembangan penting dengan dicapainya kesepakatan antara 10 (sepuluh) Negara Anggota *ASEAN* dengan *Jepang, China dan Korea Selatan* yang selanjutnya dikenal sebagai Kelompok Negara *ASEAN+3*, dengan dideklarasikannya "Pernyataan Bersama Kerjasama Asia Timur" pada Tahun 1999. Deklarasi tersebut berisi kesepakatan untuk meningkatkan dialog dan kerjasama di berbagai bidang, yang diawali dengan kerjasama *Proses Surveillance ASEAN+3* yaitu : *Proses Review Ekonomi dan Dialog Kebijakan (Economic Review and Policy Dialogue-ERPD)*. Proses *Surveillance* antara lain bermanfaat untuk mendeteksi secara dini kerentanan kondisi ekonomi dan keuangan suatu negara terhadap kemungkinan gejolak eksternal. Adapun bentuk kerjasama keuangan di Asia Timur mengarah kepada proses integrasi keuangan dan moneter terdiri dari 4 (empat) pilar utama, yaitu : *Surveillance*, Kerjasama Bantuan Likuiditas Regional (*Regional Liquidity Arrangement*), Pengembangan Pasar Modal (*Capital Market*

Development) serta Kerjasama Nilai Tukar (*Exchange Rate Cooperation*).

- b. Tugas Bank Indonesia sebagai lembaga yang menjaga stabilitas moneter (otoritas moneter) tidaklah cukup tanpa adanya dukungan stabilitas sistem keuangan yang sehat. Berkaitan dengan penyelesaian krisis keuangan di Indonesia sebagai dampak dari krisis global yang terjadi di beberapa negara-negara maju di dunia serta sebagai implikasi akibat dari terjadinya integrasi sistem keuangan di Asia Timur, terdapat 2 (dua) hal yang harus dilakukan, dan diwujudkan dalam bentuk Regulasi dan Landasan hukum bersifat permanen yang akan diambil oleh BI yang berkoordinasi dengan Pemerintah sebagai upaya untuk penyelamatan sistem perbankan nasional, yaitu : Regulasi yang efektif sebagai *legal framework* yang berkenaan dengan penyusunan perangkat aturan yang ditujukan untuk menanggulangi krisis atau *systemic risk* dan norma hukumnya dirumuskan secara berbeda dari perangkat aturan yang mengatur kegiatan usaha perbankan dalam kondisi normal, serta Regulasi yang dibuat dikaitkan dengan Kebijakan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*, yakni dalam pemberian kebijakan bantuan likuiditas terhadap penyelamatan perbankan nasional sebagai upaya penyelamatan perekonomian nasional. Disarankan Seiring dengan semakin meningkatnya permasalahan ekonomi dan regulasi keuangan regional, selain otoritas fiskal, proses peninjauan dan pengawasan dalam mekanisme *surveillance* perlu melibatkan peranan otoritas moneter dan nilai

tukar secara optimal dalam proses pengambilan keputusan dan rekomendasi kebijakan terutama dalam kerjasama ASEAN dan kawasan Asia Timur secara luas.;

Untuk mewujudkan sistem keuangan dengan regulasi dan kebijakan yang terintegrasi dalam rangka pengaturan pasar keuangan secara terpadu diperlukan berbagai inisiatif untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan dalam pembentukan nilai tukar yang terkoordinasi sebagai upaya akhir perwujudan mata uang tunggal dalam kawasan ASEAN dan kawasan Asia Timur secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ady Kusnadi, *Penelitian Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional), FH-UNPAD, 2008.
- Asami, Tadahiro dan Junichin Mori, *Regional Cooperation in Developing Bond Markets*, Sydney, 2001.
- CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1988.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Edisi ke dua), FE – UI, Jakarta, 1999.
- Dalla Ismail, *Harmonization of Bond Market Rules and Regulations in Selected APEC Economies*, Asian Development Bank, Manila, 2003.

- Djuhaendah Hasan, *Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global*, Bahan Ajar dan Materi kuliah, Bandung, 2008.
- Endang Sutrisno, *Bunga Rampai : Hukum Dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Frederic S. Mishkin, *Prudential Supervision What Works and What Doesn't*, NBER Conference Report Chicago, The University of Chicago Press, 2001.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ingo Walter, *Mergers and Acquisitions in Banking and Finance What Works, What Fails, and Why*, Oxford University Press, New York, 2004.
- Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ramkishen S. Rajan, *Sequence of Financial, Trade, and Monetary Regionalism, (Asian Economic Cooperation and Integration, Progress Prospects Challenges)*, Asian Development Bank, Manila, 2005.
- Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1977.
- Sukarela Batunanggar, *Jaring Pengaman Keuangan (Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia)*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 4 Nomor 3, Desember 2007.
- Sjamsul Arifin, R. Winantyo dan Yati Kurniati, *Integrasi Keuangan dan Moneter Di Asia Timur, Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*, Biro Hubungan Dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, PT. Elex Media Komputindo - Gramedia Group, Jakarta, 2007.
- Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- Zulkarnain Sitompul, *Problematisa Perbankan*, Books Terrace & Library (Pusat Informasi Hukum Indonesia), Bandung, 2005.

Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*
- Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang *Bank Indonesia (BI)*
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang *Lembaga Penjamin Simpanan*.
- Perppu Nomor 2 Tahun 2008 (Perppu No. 2 Tahun 2008) tentang Perubahan Kedua atas UU BI tentang *Penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank-bank bermasalah yang pada saat ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009*.
- Perppu Nomor 3 Tahun 2008 (Perppu No. 3 Tahun 2008) tentang Perubahan

atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (*berkaitan dengan Program Penjaminan Simpanan nasabah pada Lembaga Perbankan Nasional*); yang pada saat ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Perppu Nomor 4 Tahun 2008 (Perppu No. 4 Tahun 2008) tentang *Jaring Pengaman Sistem Keuangan*, merupakan Program pencegahan dan penanganan krisis.